

ANALISIS TRANSPARANSI, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MENURUT MAQASHID SYARIAH

Maulida¹⁾, Muhammad Haris Riyaldi^{2*)}

¹⁾²⁾ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala

Email: maulida7767@gmail.com, harisriyaldi@unsyiah.ac.id

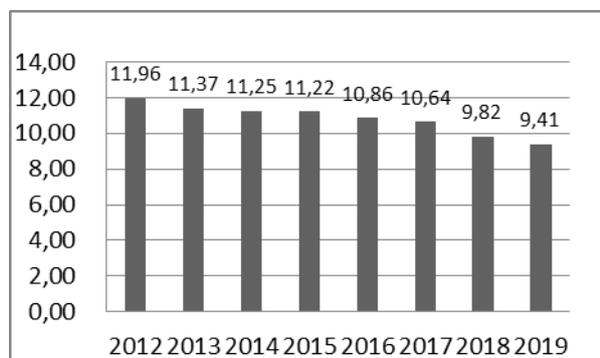
ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alokasi anggaran Kabupaten Aceh Tengah menurut tinjauan maqashid syariah dan mengetahui serta pengaruh transparansi, efisiensi, dan efektivitas terhadap kepuasan masyarakat. Populasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat Kabupaten Aceh Tengah dan dipilih sebanyak 100 sampel dengan metode probability sampling technique. Data bersumber dari data primer dan data sekunder. Analisis data menggunakan metode deskriptif dan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi anggaran Kabupaten Aceh Tengah memenuhi penjagaan lima unsur maqashid syariah. Transparansi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. Dengan demikian, pihak lembaga pengelola keuangan daerah harus memperhatikan faktor transparansi, efisiensi, dan efektivitas untuk menjaga kepuasan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah agar terciptanya good governance.

Kata Kunci : *Transparansi, Efisiensi, Efektivitas, dan Kepuasan Masyarakat*

1. Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang menghadapi permasalahan kemiskinan. Besarnya jumlah penduduk miskin menjadikan Indonesia termasuk ke dalam negara yang sedang berkembang (*developing countries*). Pembangunan di Indonesia merupakan upaya untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan yaitu menurunkan tingkat kemiskinan.



Gambar 1 Tingkat Kemiskinan di Indonesia periode tahun 2012 – 2019

Pada Gambar 1 dapat diamati bahwa tingkat kemiskinan mengalami penurunan setiap tahun. Ini menunjukkan bahwa pembangunan nasional

berhasil memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat.

Walaupun secara nasional kemiskinan mengalami penurunan, namun hal ini tidak secara merata dialami oleh provinsi di Indonesia. Artinya masih terdapat provinsi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Salah satu provinsi tersebut adalah Provinsi Aceh. Pada September 2019, persentase penduduk miskin di Aceh mencapai 15,01 persen, mengalami penurunan dibandingkan dengan September 2018 yang mencapai 15,68 persen. Walaupun menurun tingkat kemiskinan di Aceh masih sangat jauh dari persentase kemiskinan nasional.

Aceh telah diberi keistimewaan agar bisa menjalankan pemerintahannya sesuai dengan syariat Islam. Syariat Islam yang berlaku tak hanya dalam bidang keagamaan saja, melainkan segala aspek kehidupan. Baik pemerintahan, maupun pembangunan yang ada haruslah berlandaskan kepada syariat Islam. Daerah paling barat dari Indonesia ini harus bisa mempertanggung jawabkan dan menggunakan serta memanfaatkan sumber daya yang ada dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam termasuk untuk penyusunan Rancangan Anggaran dan Belanja Aceh dengan transparan dan efisien agar pembangunan dapat merata dan kesejahteraan dapat tercapai.

Salah satu Kabupaten di Aceh dengan tingkat kemiskinan yang termasuk paling tinggi yaitu Kabupaten Aceh Tengah. Per-September 2017, jumlah penduduk Kabupaten Aceh Tengah sebesar 204.273 jiwa dengan angka kemiskinan berkisar 34.240 jiwa atau 16,84% dan angka ini jauh diatas persentase rata-rata kemiskinan nasional yang berada di 10,12% per september 2017 (BPS Aceh Tengah, 2017). Kemiskinan di Kabupaten Aceh Tengah mengalami fluktuasi selama 4 tahun terakhir, dimana kenaikan angka untuk kemiskinan dari tahun 2014 ke dan tahun 2015 sebesar 1.450 jiwa pada tahun 2015 dengan total jumlah menjadi 34.260 jiwa penduduk miskin setara dengan 17,51%. Selanjutnya ditahun 2016 mengalami penurunan sejumlah 1.100 jiwa atau menjadi 33.160 jiwa penduduk miskin dengan persentase 16,64%. Di tahun 2017 meningkat sebesar 1.080 jiwa dengan total jumlah penduduk miskin berkisar 34.240 jiwa dengan persentase 16,84%.

Tabel 1 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Aceh Tengah 2014-2017

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase (%)
2014	32.810	16,99
2015	34.260	17,51
2016	33.160	16,64
2017	34.240	16,84

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017.

Indikator kemiskinan di Kabupaten Aceh Tengah adalah tidak meratanya sumber daya manusia atau disebabkan dengan minimnya lapangan pekerjaan yang berkaitan dengan masyarakat yang sulit untuk meningkatkan ekonominya. Dalam aspek kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah yaitu sektor pertanian sebesar 45,76%, disusul oleh sektor kontruksi dengan 19,46% dan sektor jasa sebesar 13,24%. Pada tahun 2018, Anggaran untuk Pendapatan dan anggaran Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tengah sebesar 1,2 Triliun.

Namun, dengan jumlah anggaran yang cukup fantastis tersebut tidak secara langsung membawa perubahan daerah Kabupaten Aceh Tengah menjadi lebih baik. Jika ditinjau dari aspek syariah, di dalam mengelola keuangan harus ada kewajiban menyampaikan amanah, menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran serta berpegang pada prinsip ma'aruf dan nahi munkar agar terhindar dari kegiatan yang menyimpang dari ajaran syariah. Tujuan dari pembangunan menurut maqashid (tujuan) syariah adalah terciptanya keadilan distributif

yang merata keseluruh kalangan masyarakat yang dapat menjamin kemaslahatan manusia. Pembangunan secara maqashid syariah meletakkan manusia sebagai subjek sekaligus sebagai suatu objek objek terhadap pembangunan mengingat manusia sebagai khalifah dimuka bumi (Rama, 2013). Oleh karena itu, pengelolaan keuangan di Aceh seharusnya diarahkan untuk mewujudkan pemenuhan maqashid Syariah. Dengan demikian, dapat tercapai kemaslahatan dalam kehidupan setiap warga yang ditandai dengan tingkat kepuasan masyarakat.

Fenomena masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Tengah di tengah besarnya anggaran untuk pembangunan menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai transparansi, efisiensi dan efektivitas alokasi belanja pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk mewujudkan kepuasan masyarakat. Artikel ini berawal dengan pendahuluan, tinjauan teoritis, metode penelitian, hasil dan pembahasan mengenai pengaruh transparansi, efisiensi dan efektivitas alokasi belanja pemerintah terhadap kepuasan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. Dan pada bagian akhir ditutup dengan kesimpulan dan saran.

2. Kajian Teoritis

a. Konsep Pembangunan Ekonomi dalam Tinjauan Maqashid Syariah

Secara bahasa maqashid al-syari'ah yaitu terdiri dari dua kata yaitu kata maqashid dan kata syari'ah. Maqashid adalah bentuk jamak dari maqshid yang berarti kesengajaan atau tujuan Syariah diartikan yaitu jalan yang menuju air atau jalan untuk mencapai sumber kehidupan (Fachtur, 1984). Tujuan pembangunan ekonomi dalam ekonomi Islam yaitu untuk menghasilkan keadilan distribusisehingga terpenuhi kebutuhan dasar ekonomi masyarakat sebagai jaminan untuk dapat pemeliharaan Maqashid Syariah (Agung, 2013). Tidak ada terpenuhi hak dasar tersebut disebabkan tidak baik distribusi yang menciptakan suatu masalah pada ekonomi yang artinya kondisi masyarakat tidak baik.

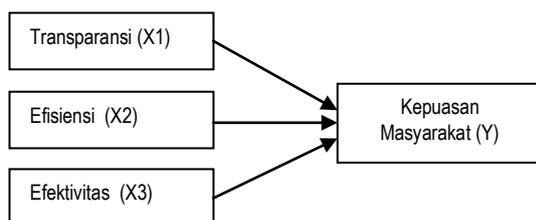
Prinsip dasar maqashid syariah untuk menciptakan kesejahteraan tidak akan bisa terpenuhi melainkan dengan peran aktif Negara (Syamsuri, 2019). Oleh karena itu, ada kaitan hubungan antara melakukan pembangunan ekonomi yang berbasis sesuai Maqashid Syariah dengan pemenuhan kewajiban kebutuhan dasar hidup manusia serta hubungannya dengan kondisi kesejahteraan masyarakat (Fadlan, 2010).

Kepuasan merupakan salah satu fungsi dari perbedaan antara untuk menilai kinerja yang

dirasakan dengan harapan masyarakat pada pelayanan yang ada disediakan pemerintah. Apabila kinerja yang adadi bawah harapan, maka otomatis masyarakat akan ,merasakan hal yang membuat masyarakat kecewa. jika kinerja tersebut sesuai dengan harapan masyarakat, maka masyarakat akan puas (J. Supranto, 1997).

Arti transparansi yaitu adanya keterbukaan akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi dalam hal mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta tanggung

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Hipotesis

Hipotesis penelitian ini adalah:

- H₁ : Transparansi pengelolaan keuangan Kabupaten Aceh Tengah dalam alokasi dana APBK tahun 2017 ditinjau dari segi maqashid syariah berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat.
- H₂ : Efisiensi pengelolaan keuangan Kabupaten Aceh Tengah dalam alokasi dana APBK tahun 2017 ditinjau dari segi maqashid syariah berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat.
- H₃ : Efektivitas pengelolaan keuangan Kabupaten Aceh Tengah dalam alokasi dana APBK tahun 2017 ditinjau dari segi maqashid syariah berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat.
- H₄ : Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel transparansi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan Kabupaten Aceh Tengah dalam mengalokasikan dana APBK tahun 2017 ditinjau dari segi maqashid syariah berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat.

3. Metodologi

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Tengah dan dengan metode kuantitatif. Bertujuan melihat pengelolaan keuangan daerah dari segi maqashid syariah dan pengaruhnya terhadap kepuasan masyarakat Kabupaten Aceh

Tengah. Oleh sebab itu, variabel dalam penelitian ini terdiri dari Transparansi (X1), Efisiensi (X2), Efektivitas (X3) dan Kepuasan Masyarakat (Y).

Populasi pada penelitian ini yaitu penduduk berumur dari 20 sampai 64 tahun sebanyak 100 responden yang dipilih berdasarkan metode *simple random sampling*. Uji validitas dilakukan agar mengetahui ketepatan instrument dengan teknik korelasi *product moment* (KPM). Selanjutnya uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui keandalan instrumen dengan menghitung nilai *alpha cronbach*. Pengujian asumsi klasik juga dilakukan terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas dan heteroskedasitas.

Penelitian ini menganalisis pengaruh variabel Transparansi, Efisiensi dan efektivitas terhadap kepuasan masyarakat pada lembaga pengelolaan keuangan daerah, sehingga alat analisis yang digunakan regresi linear berganda dengan tujuan untuk melihat nilai rata-rata variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebas yang diketahui (Ghozali, 2012).

$$Y = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

Y	= Kepuasan Masyarakat,
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien Regresi
X ₁	= Transparansi,
X ₂	= Efisiensi,
X ₃	= Efektivitas,
e	= Error term

4. Hasil dan Pembahasan

a. Gambaran Realisasi Anggaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menyusun alokasi anggaran dan merealisasikan anggaran belanja tersebut kepada masyarakat melalui alokasi anggaran menurut kebutuhan pada instansi di bawah pemerintah Kabupaten Aceh. Gambaran anggaran belanja pemerintah Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Tahun Anggaran 2017

No.	Uraian	Jumlah Anggaran setelah perubahan	Bertambah / (Berkurang)	
			Realisasi	(%)
1	Pendapatan	1,538,696,458,580.00	1,508,597,841,387.27	98,04
2	Urusan wajib pelayanan dasar	128,488,330,790.00	114,518,070,173.00	89,13
3	Dinas Pendidikan	22,805,810,369.00	22,593,131,546.00	99,07
4	Dinas Kesehatan	15,480,000,000.00	12,826,850,569.00	99,07
5	BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Takengon	89,059,520,421.00	78,120,352,618.00	87,72
6	Bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1,068,000,000.00	944,435,440.00	88,43
7	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	75,000,000.00	33,300,000.00	44,40
8	Dinas Lingkungan Hidup	761,880,000.00	647,843,000.00	85,03
9	Dinas Perhubungan	735,452,500.00	519,550,008.00	70,64
10	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	250,000,000.00	698,587,850.00	79,44
11	Urusan Pilihan	9,062,427,000.00	2,683,550,010.00	29,61
12	Dinas Kelautan dan Perikanan	60,000,000.00	60,540,000.00	100,90
13	Dinas Pariwisata	150,000,000.00	92,000,000.00	61,33
14	Dinas Pertanian	673,000,000.00	87,591,000.00	13,02
15	Dinas Perdagangan	8,179,427,000.00	2,443,419,010.00	29,87
16	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	1,399,392,770,324.0	1,389,530,240,346.27	99,30
17	Administrasi Pemerintahan	14,074,525,000.00	16,787,217,955.13	119,27
18	Sekretariat Daerah	74,525,000.00	60,300,000.00	80,91
19	Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah	8.866.049.670,00	8.399.894.875,00	94,74
20	Sekretariat Baitul Mal	14,000,000,000.00	16,726,917,955.13	119,48
21	Dinas Keuangan	1,385,318,245,324.0	1,372,743,022,391.14	99,09
	Nilai Rata-rata			79,52%

Sumber : DPPKAD Aceh Tengah (2017).

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa pendapatan daerah Kabupaten Aceh Tengah sebesar Rp1.538.696.458.580,00 dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp1.508.597.841.387,27. Jika ditinjau alokasi anggaran tersebut menurut tinjauan maqashid Syariah, maka perlu diperhatikan tingkat pencapaian realisasi APBK Kabupaten Aceh Tengah menurut *maqasid syariah* yang terbingkai dalam *addharuriyah al-khams*. Maka metode yang digunakan untuk menganalisis data penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis domain. Dalam hal ini, lima kebutuhan pokok (*ad-dharuriyah al-khams*) menjadi daftar domain yang digunakan untuk menganalisis alokasi APBK tahun 2017. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3 Hubungan Pola Semantik Maqashid Syariah Terhadap Realisasi APBK Aceh Tengah

No	Domain	Hubungan Simantik	Bentuk Hubungan	Realisasi
1	Penjagaan Agama	Agama Ketertiban Ketentraman	Ideologi Shalat Puasa Zakat Haji Hisbah Keadilan	Terpenuhi, karena adanya alokasi pada dinas Syariat Islam dan Baitul Mal.
2	Penjagaan Jiwa	Pertahanan Perumahan Perlindungan sosial Kesehatan fasilitas umum	Papan Pangan Transportasi Infrastruktur jalan Keamanan Lapangan kerja Pelayanan sosial	Terpenuhi, karena adanya alokasi Pada Dinas Kesehatan dan Urusan Pelayanan dasar.
3	Penjagaan Akal	Pendidikan Pariwisata dan budaya	Pendidikan Media pengetahuan Riset	Terpenuhi, dengan adanya alokasi pada Dinas Pendidikan
4	Penjagaan Keturunan	Lingkungan Hidup	Lembaga perkawinan Pelayanan bagi anak Pembinaan ibu hamil Memelihara anak yatim	Terpenuhi, karena ada alokasi pada dinas Lingkungan hidup dan dinas kesehatan
5	Penjagaan Harta	Ekonomi	Kuangan pemeliharaan harta Jaminan hak kepemilikan barang pribadi Penegakan hukum dan pengawasan	Terpenuhi, karena ada Alokasi pada Badan Pengelola keuangan, Dinas perdagangan, Koperasi dan UMKM.

b. Profil Responden

Responden pada penelitian ini terdiri dari 100 orang warga masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. Jumlah responden ialah wanita 53 orang, dan laki-laki 47 orang. Sedangkan berdasarkan usia, responden yang berusia kurang dari atau sama dengan 20 tahun sebanyak 7 responden atau 7%, berusia antara 21 - 30 tahun sebanyak 18 responden, berusia 31 - 40 tahun sebanyak 44 responden, berusia 41 - 50 tahun sebanyak 29 responden, dan

berusia lebih dari 51 tahun sebanyak 2 responden atau 2%. Pada pendidikan terakhir mayoritas responden memiliki riwayat pendidikan terakhir di jenjang D3, dan pekerjaan mayoritasnya adalah yang berprofesi sebagai PNS dan pendapatan perbulan di dominasi oleh responden dengan pendapatan rata-rata per bulan Rp1.000.000-<Rp2.000.000.

Terkait persepsi responden disajikan pada Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4
Hasil Persepsi Responden

No	Variabel	Rata-rata	Keterangan
1	Transparansi	3,86	Baik
2	Efisiensi	3,75	Baik
3	Efektivitas	3,71	Baik
4	Kepuasan Masyarakat	3,87	Baik

Sumber: data diolah (2019)

Pada Tabel 4, responden memberikan persepsi yang tergolong baik mengenai transparansi, efisiensi dan efektivitas alokasi anggaran Kabupaten Aceh Tengah. Artinya, menurut penilaian masyarakat alokasi anggaran pada Kabupaten Aceh Tengah telah dijalankan secara transparan, efisien dan efektif. Demikian juga tingkat kepuasan masyarakat menunjukkan kecenderungan persepsi positif (tergolong baik).

c. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 5 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients Beta	t _{hitung}	Sig
Transparansi	0,206	2,016	0,047
Efisiensi	0,401	3,803	0,000
Efektivitas	0,229	2,535	0,013

Sumber: Data diolah (2019)

Berdasarkan Tabel 5, model regresi dapat dianalisis berdasarkan koefisien-koefisiennya, berikut adalah model persamaan regresi linearnya.

$$Y = 0,206 \text{ Tran} + 0,401 \text{ Efis} + 0,229 \text{ Efek}$$

Koefisien regresi variabel transparansi (X1) yaitu 0,206. Artinya apabila ada perubahan terhadap transparansi yaitu sebanyak 1 satuan, maka secara relatif akan memberikan kepuasan kepada masyarakat Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 0,206 atau 20,6%. Dengan demikian apabila transparansi pada pengelolaan anggaran APBK semakin meningkat, maka akan menambah rasa kepuasan pada masyarakat Kabupaten Aceh Tengah.

Koefisien untuk regresi pada variabel efisiensi (X2) yaitu 0,401. Artinya setiap adanya perubahan terhadap efisiensi sebanyak 1 satuan, maka secara relatif akan menaikkan kepuasan masyarakat sebanyak 0,401 atau

40,1%. Dengan demikian apabila tingkat efisiensi pengelolaan anggaran APBK ditingkatkan, maka akan menambah tingkat kepuasan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah.

Koefisien pada regresi pada variabel efektivitas (X3) sebesar 0,029. Artinya setiap adanya perubahan terhadap efisiensi sebesar 1 satuan, maka secara relatif akan menaikkan kepuasan masyarakat sebanyak 0,029 atau 10,29%. Dengan demikian apabila tingkat efektivitas pengelolaan anggaran APBK ditingkatkan, maka akan menambah tingkat kepuasan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah.

Hasil Uji Koefisien Determinasi ditunjukkan pada Tabel 6 berikut ini:

Tabel 6. Hasil Uji Pada Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,737	0,544	0,529	2,83813

Sumber: Data diolah (2019)

Berdasarkan tabel 4.20 nilai pada koefisien korelasi adalah sebesar 0,737. Hal tersebut menunjukkan bahwa transparansi (X1), efisiensi (X2), dan efektivitas (X3) mempunyai hubungan erat terhadap kepuasan masyarakat (Y) karena kisaran R yang mendekati angka 1. hubungan erat terhadap kepuasan

masyarakat (Y) karena kisaran R yang mendekati angka 1.

Uji simultan yang dilakukan untuk melihat apakah pengaruh secara simultan pada variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Berikut adalah hasil dari uji simultan (uji F):

Tabel 7. Uji Hipotesis Simultan (F)

Model	F	Sig
Regression	38,506	0,000

Sumber: Data Primer diolah (2019)

Berdasarkan Tabel 7, dijelaskan nilai F_{hitung} sebanyak 38,506, dengan tingkat ukuran signifikan p -value sebanyak 0,000 atau $< 0,05$

sedangkan F_{tabel} sebesar 2,699. Hasil ini menunjukkan nilai F hitung lebih besar daripada F_{tabel} , sehingga kesimpulannya adalah

transparansi (X1), efisiensi (X2), dan efektivitas (X3) pengelolaan anggaran APBK secara simultan berpengaruh signifikan terhadap

kepuasan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka hipotesis H_{a1} diterima.

Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial disajikan pada Tabel 8 berikut ini:

Tabel 8. Uji Hipotesis Parsial (t)

Model	T _{hitung}	Sig
Transparansi	2,016	0,047
Efisiensi	3,803	0,000
Efektivitas	2,535	0,013

Sumber: Data Primer diolah (2019)

Nilai t_{hitung} variabel transparansi sebesar 2,016 dan nilai signifikansi 0,047. Disebabkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,016 > 1,984$) dan tingkat signifikan $0,047 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat transparansi (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat.

Nilai t_{hitung} variabel efisiensi sebesar 3,803 dan nilai signifikansi 0,00. Disebabkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,803 > 1,984$) dan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat.

Nilai t_{hitung} variabel efektivitas sebesar 2,535 dan nilai signifikansi 0,013. Disebabkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,535 > 1,980$) dan tingkat signifikan $0,013 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat.

Berdasarkan hasil ini Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah perlu menjaga transparansi, efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran. Hal ini merupakan upaya dalam rangka mengelola keuangan daerah sesuai dengan maqashid Syariah. Walaupun masyarakat menilai pengelolaan anggaran Kabupaten Aceh Tengah sudah baik, namun perlu diperhatikan hasil akhirnya yaitu menurunnya tingkat kemiskinan. Dan perlu juga dilihat hasil pembangunan berupa tingkat kesejahteraan masyarakat yang terwujud secara merata dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sebagai bahan evaluasi dalam rangka memperbaiki kualitas pembangunan daerah.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran Kabupaten Aceh Tengah telah memenuhi maqashid syariah.
2. Menurut persepsi masyarakat Kabupaten Aceh Tengah, tingkat transparansi, efisiensi

dan efektivitas alokasi anggaran dalam rangka pengelolaan keuangan sudah baik.

3. Transparansi, efisiensi dan efektivitas berpengaruh positif terhadap kepuasan masyarakat, baik secara simultan maupun parsial.

6. Daftar Pustaka

- Agung, EP. 2013. Pembangunan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo. Vol.10, no,1. 2013.
- Badan Pusat Statistik dan Bappeda Aceh dalam Angka 2017.
- Cahyono, Heru. 2016. E-journal "Evaluasi Atas Pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh : Gagal Menyejahterakan Rakyat dan Sarat Konflik Internal".
- Fadlan. 2010. Konsep Pembangunan Ekonomi Berbasis Islam. Vol, V. No,2. E-journal. Stainpamekasan.ac.id, Desember 2010.
- Facthur Rahman, Islam, alih Bahasa Ahsin Muhammad, (Bandung : Pustaka, 1984).
- Ghozali, Imam. 2012. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Yogyakarta: Universitas Diponegoro.
- Hans Wehr, A Dectonary of Modern Written Arbic , J. Milton Coan , (London :Macdonal and Evans LTD, 1980).
- Handyaningrat, 1994. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen.
- Mulyana, AR. 1987. Prinsip-Prinsip Ekonomi, Jakarta : Universitas Indonesia.
- Rama, Ali dkk, 2013. Pembangunan Ekonomi Dalam Tinjauan Maqashid Syariah. Jurnal vol.36, No. 1.
- Sulistiani, Siska Lis. Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal Di Indonesia. Law and Jurnal Justice, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2018.

Syamsuri, Dadang. “ *Negara Kesejahteraan dan Maqashid Syariah*”. jurnal VOL.4. No.1, Februari 2019. Program Studi Ekonomi Islami, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Universitas Darussalam Gontor.

Loina Lalolo. K. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta.